PENGARUH SURAT TAGIHAN PAJAK DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus pada KPP Pratama Purwakarta)

THE INFLUENCE OF TAX COLLECTION LETTER AND NUMBER OF TAXABLE EMPLOYERS TO VALUE ADDED TAX REVENUE
(Case Study at KPP Pratama Purwakarta)

GIA MEIDHA GIANI

21112148

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

This study empirically examine the influence of tax collection letter and number of taxable employers to value added tax revenue on KPP Pratama Purwakarta in 2013 - 2015. The problem that occurs on KPP Pratama Purwakarta is the increased amount of tax collection letter issued and the addition of number of taxable employers registered but the value added tax revenue is not yet reached the target.

This research uses descriptive analysis verification by as many as 36 data on the number of tax collection letter issued, the number of registered of taxable employers and value added tax revenue monthly from year 2013 to 2015 on KPP Pratama Purwakarta and using goals saturated samples. Mechanical data used is multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that variable tax collection letter positive effect on value added tax revenue and variable number of taxable employers positive effect on value added tax revenue on KPP Pratama Purwakarta in the years 2013-2015.

Keywords: Number Of Taxable Employers, Number Of Taxable Employers, Value Added Tax Revenue

I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pemerintahan di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal (Siti Kurnia Rahayu 2010: 52). Sumber dana tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya. Maka secara sederhana penerimaan negara dapat dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak (Siti Kurnia Rahayu 2010: 53).

STP PPN dapat diterbitkan karena PKP tidak melaporkan kewajiban berkaitan dengan PPN. STP PPN juga dapat diterbitkan karena adanya kesalahan dari WP atau PKP seperti, bukan PKP menerbitkan faktur pajak, faktur pajak tidak lengkap, kesalahan hitung dan lain-lain (Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono, 2009: 277).Menurut Waluyo (2011:43) yang menyebabkan pajak yang harus dibayarkan bertambah adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali (Waluyo, 2011: 43).

Pada dasarnya setiap pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 164).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang dapat di identifikasikan adalah:

1) Penerimaan pajak per Februari 2016 belum sesuai ekspektasi atau perencanaan yang telah disusun karena target penerimaan terlalu tinggi.
2) STP yang diterbitkan tahun ini lebih banyak dari periode tahun sebelumnya.
3) Tidak semua STP PPN yang diterbitkan dibayar oleh PKP.
4) Tidak semua PKP yang terdaftar merupakan PKP Efektif.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang diangkat oleh penulis dalam penilitian ini adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2) Seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Tujuan dan Maksud Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh surat tagihan pajak dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2) Untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Paja Pertambahan Nilai.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi baik pada surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak maupun penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka fenomena pada penerimaan pajak pertambahan nilai dapat diperbaiki melalui pelaksanaan surat tagihan pajak dan jumlah pengusaha kena pajak yang benar.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menunjukan bahwa penerimaan pajak pertambahan niai seharusnya tidak menurun dengan diterbitkannya surat tagihan pajak dan jumlah pengusaha kena pajak yang taat pada peraturan dan membayar STPnya, serta untuk pengembangan ilmu terkait perihal surat tagihan pajak, pengusaha kena pajak, dan penerimaan pajak pertambahan nilai.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Tagihan Pajak

Siti Resmi (2014: 55) mendefinisikan Surat Tagihan Pajak adalah sebagai berikut:

"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda".

2.1.2 Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha menurut Siti Resmi (2014: 19) adalah sebagai berikut:

"Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean".

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010: 125) adalah sebagai berikut:

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabeaan) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP)".

2.2 kerangka pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono (2013), Yohanes Kresna (2014) dan Dedy Setya Utama Pansiangan (2014), menyimpulkan bahwa STP PPN memiliki pengaruh negatif (tidak searah) dan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Karena semakin banyak STP PPN yang diterbitkan belum tentu menambah penerimaan PPN, hal ini disebabkan sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah.

2.2.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dedy Setya Utama Pansiangan (2014) dan Yohanes Kresna, menyimpulkan bahwa PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN dan menunjukan nilai koefisien bertanda positif. Dengan kata lain semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak.

2.3 Hipotesis

Dalam penelitian ini, Penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Surat Tagihan Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H2: Jumlah Pengusaha Kena Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penilitian menurut Umi Narimawati (2008: 127) adalah sebagai berikut:

"Metode Penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu."

Metode penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Variabel X1 dan Variabel X2 terhadap Variabel Y dan menguji teori dengan pengujian hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012:38) mendefinisikan operasional variabel adalah sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Jenis Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua variabel yaitu:

1) Variabel Bebas (Independent Variabel (X))

Pengertian variabel independent menurut Sugiyono (2014: 39) yaitu:

"Variabel independent merupakan variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulasi, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas.Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat)."
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Surat Tagihan Pajak yang berindikator jumlah STP PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang berindikator jumlah PKP.

2) Variabel Terikat (Dependen Variabel (Y))
Pengertian varibel dependent menurut Sugiyono (2014: 39) yaitu:
"Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas."
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang berindikator Jumlah Penerimaan PPN.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan peneliti adalah data sekunder, dimana data tersebut sudah tersedia dan tidak perlu diubah lagi. Data-data ini merupakan data yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilaksanakan dan bersumber dari laporan penerimaan PPN, jumlah PKP dan STP PPN dari KPP Pratama Purwakarta.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode dokumentasi, penelitian kepustakaan dan wawancara.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta waktu penelitian

Populasi yang menjadi sasaran populasi adalah laporan penerimaan PPN, jumlah PKP dan STP PPN dari KPP Pratama Purwakarta yang diambil data perbulan dari Januari 2013 sampai dengan Desember 2015, karena jika pertahun data tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan perhitungan statistic pada uji asumsi klasik sehingga data yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 36 bulan di KPP Pratama Purwakarta. Teknik sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus.

3.5 Metode Pengujian Data

Metode pengujian data yang penulis pakai dalam penelitian ini dalah analisis kuantitatif. Metode Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda, yaitu metode analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Besar presentasi surat tagihan pajak adalah 17,6% terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Purwakarta. Artinya penerimaan pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh surat tagihan pajak sebesar 17,6% dan sebanyak 82,4% dipengaruhi faktor lain. Besarnya pengaruh surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai memberikan pengaruh dengan korelasi yang sedang dan bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi surat tagihan pajak, maka semakin tinggi penerimaan pajak pertambahan nilai.

2) Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Besar presentasi jumlah pengusaha kena pajak adalah sebesar 57,9% terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Purwakarta. Artinya penerimaan pajak pertambahan nilai di perngaruhi oleh jumlah pengusaha kena pajak sebesar 57,9% dan sebanyak 42,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya pevngaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan memberikan pengaruh dengan korelasi yang kuat dan bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi jumlah pengusaha kena pajak, maka semakin tinggi penerimaan pajak pertambahan nilai.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dimana ketika jumlah pengusaha kena pajak meningkat maka penerimaan pajak pertambahan nilaipun akan meningkat. Keterbatasan penelitian terkait data yang diolah tidak menunjukan hasil sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Masalah penerimaan pajak pertambahan nilai pada penelitian ini tidak dikarenakan kenaikan dari jumlah STP PPN yang diterbitkan, hal ini terjadi karena STP PPN yang jumlah tagihannya cenderung kecil telah dilunasi sehinga tidak menimbulkan dampak yang besar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dimana ketika jumlah pengusaha kena pajak meningkat maka penerimaan pajak pertambahan nilaipun akan meningkat. Masalah penerimaan pajak pertambahan nilai pada penelitian ini yang tidak mencapai target, hal ini dikarekan jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar tidak seluruhnya membayar kewajiban perpajakannya dan juga akibat restitusi PPN di KPP Pratama Purwakata yang lumayan besar.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

1) Bagi Pemerintah

   Perlunya kebijakan yang tepat dalam menentukan berapa jumlah denda maksimal yang dikenakan pada wajib pajak dan juga dalam hal penentuan target pajak sehingga tidak merugikan pengusaha kena pajak maupun pemerintah, karena apabila target pajak terlalu tinggi tapi tanpa melihat kondisi ekonomi Indonesia dan pengusahanya itu sendiri akan sangat membebankan kepada pengusaha dan akan menyebabkan banyak PKP yang akan berpeluang melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan.

2) bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta

   KPP Pratama Purwakarta diharapkan lebih mengawasi jumlah pengusaha kena pajak terdaftar dan pengusaha kena pajak yang bermasalah terkait belum atau terlambat dalam membayar atau melunasi kewajiban perpajakannya dan disarankan agar semakin gencar untuk mengosialisasikan mengenai pentingnya perpajakan secara berkala, agar pengusaha pajak yang kurang paham dan bermasalah dapat mengerti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan pajak.

5.2.2 Saran Akademis

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan variabel bebas yang digunakan hendaknya tidak hanya surat tagihan pajak dan jumlah pengusaha kena pajak, karena masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Selain itu, diharapkan tempat penelitian sebaiknya lebih dari 1 (satu) KPP dan memperbanyak lagi sampel yang diteliti untuk memperkuat hasil penelitian dalam upaya menguatkan teori yang sudah ada.

VI DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Djoko Muljono. 2010. Panduan Brevet Pajak: PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB. Yogyakarta: ANDI.

Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono. 2009. Akuntansi Pajak Lanjutan. Yogyakarta: ANDI.

Guilford, J.P. 1956. Fundamental Statistic in Psychology And Education. 3rd Ed. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc

Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.

Husein Umar, 2008. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Imam Ghozali. (2007). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit - Undip.

John Hutagaol. 2007. Perpajakan: Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan: Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI.

Mohammad Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nanang Martono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2014. Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salaemba Empat.

Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian dan Bisnis. Bandung: CV.Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Bandung: CV.Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan: Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI.

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media

Umi Narimawati dkk. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Genesis.

_____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia: Edisi 10 Buku 1. Jakata: Salemba Empat.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia: Edisi 10 Buku 2. Jakata: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. Akuntansi Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

JURNAL

Arif Nurrokhman. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.

Dedy Setya Utama Pandiangan. 2014. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Perambahan Nilai (PPN). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Ika Nursanti dan Yazid Yud Padmono. Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurna Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 1 Nomor 1, Januari 2013.

Wandha M. Supit., D.P.E. Saerang., H. Sabijono. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Manado: Universitas Sam Ratulangi. ISSN 2303-1174.

Yohanes Kresna. 2014. Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

ARTIKEL

Chandra Budi. 2014. Melalui: http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/01/04/batasan-omzet-pengusaha-kecil-wajib-ppn-dinaikkan

Ken Dwijugiasteadi. 2016. Melalui: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/03/07/o3o854382-realisasi-penerimaan-pajak-februari-belum-capai-target

Sigit Priadi Pramudito. 2015. Melalui: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150820150855-78-3399/demi-rp-77-triliun-ditjen-pajak-rela-kirim-353751-tagihan/

Yustinus Prastowo. 2015. Melalui: http://finansial.bisnis.com/read/20150807/10/460101/penerimaan-ppn-ppnbm-risiko-kontraksi-tak-terhindarkan